

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT PLN) PERSERO DALAM HAL TERJADI PERJANJIAN PENGALIHAN TERHADAP PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG SEMULA DIBIYAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA MENJADI ANGGARAN PLN (APLN)

Studi Kasus Terhadap Perjanjian Pembangunan Gardu Induk Cilegon Baru II antara PT PLN (Persero) & PT Arya Sada Konsorsium

**Intisari
Oleh**

Isti Putri Rizqiah¹ dan Irna Nurhayati²

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu (1) untuk mengetahui dan mengkaji implikasi hukum dari adanya perjanjian Pengalihan dalam pelaksanaan perjanjian Pembangunan GI Cilegon Baru II bagi PLN. (2) untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap PLN dalam hal terjadi perjanjian pengalihan terhadap perjanjian Pembangunan GI Cilegon Baru II yang semula dibayai APBN menjadi APLN.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif empiris, dilakukan dengan mengkaji dan mendeskripsikan bahan-bahan pustaka dikaitkan dengan hasil wawancara narasumber dan responden yang berkaitan dengan permasalahan. Objek pembahasannya menitikberatkan pada implikasi hukum dan perlindungan hukum dalam hal terjadi perjanjian pengalihan terhadap perjanjian pengadaan barang/jasa yang semula dibayai APBN menjadi APLN bagi PT PLN.

Hasil penelitian: (1) Implikasi hukum adanya Perjanjian Pengalihan dalam pelaksanaan Perjanjian Pembangunan GI Cilegon Baru II bagi PLN antara lain; Beralihnya hak dan kewajiban dari Pemerintah kepada PLN sehingga PLN berhak menerapkan aturan internal PLN dalam penyelesaian pembangunan GI Cilegon Baru II, Status APBN yang telah dibayarkan oleh Pemerintah dikategorikan sebagai BPYDBS kepada PLN selama proyek belum selesai, PLN berkewajiban melakukan pembayaran kepada Arya Sada konsorsium sesuai progress terakhir, PLN berkewajiban memastikan Arya Sada Konsorsium untuk mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan oleh Pemerintah. (2) Perlindungan hukum terhadap PLN dalam hal terjadi perjanjian pengalihan terhadap perjanjian Pembangunan GI Cilegon Baru II yang semula dibayai APBN menjadi APLN meliputi pengembalian uang muka oleh Arya Sada konsorsium kepada Negara dan perubahan jaminan pelaksanaan dengan penerima manfaat adalah PLN, sebagaimana diatur dalam diktum dua Kepmen ESDM 171/2015 dan Pasal 11 Perdir 01/2015.

Kata Kunci : Perjanjian Pengalihan, APBN, Pengadaan barang dan/atau jasa, Implikasi Hukum, Perlindungan Hukum.

¹ Pegawai Tugas Belajar PT PLN (Persero), Beasiswa Penghargaan Direksi Kerjasama PLN-UGM MIH Kampus Jakarta Tahun 2017.

²Dosen Pengajar pada Departemen Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Pembimbing Akademik).

**LEGAL PROTECTION FOR PT PLN (PERSERO) IN THE EVENT OF
NOVATION CONTRACT ON THE AGREEMENT OF PROCUREMENT
OF GOODS/SERVICES THAT WERE FINISHED
FROM APBN BECOME APLN**

**Case Study of the Agreement on the Construction of New Cilegon Substation
II between PT PLN (Persero) & PT Arya Sada Consortium**

Abstract

By

Isti Putri Rizqiah¹ and Irna Nurhayati²

This study has the objectives of (1) to find out and examine the legal implications of the transfer agreement in the implementation of the New Cilegon GI Development Agreement II for PLN. (2) to review the legal protection of the National Electric Company in the event of a transfer agreement regarding the agreement on the Construction of the New GI Cilegon II which was originally funded by the State Budget to become the APLN.

This study is an empirical normative study, conducted by studying and describing library materials associated with the results of interviewees and respondents related to the problem. The object of the discussion focuses on legal implications and legal protection in the event of a transfer agreement regarding the goods/services procurement agreement which was originally funded by the State Budget to become the APLN for PT PLN.

The results of the study: (1) The legal implications of the novation contract in the implementation of the New Cilegon GI Development Agreement for PLN include; The transfer of rights and obligations from the Government to PLN so that PLN has the right to implement PLN's internal rules in the completion of construction of the New GI Cilegon II. The status of the State Budget paid by the Government is categorized as BPYDBS to PLN as long as the project has not been completed. Finally, the PLN is obliged to ensure that Arya Sada Consortium returns the down payment paid by the Government. (2) Legal protection against PLN in the event of a transfer agreement regarding the New GI Cilegon II Development agreement which was originally funded by the State Budget to become APLN including the return of advances by the Arya Sada consortium to the State and the change in the implementation guarantee with the beneficiary is as stipulated in dictum two Minister of Energy and Mineral Resources Decree 171/2015 and Article 11 Regulation 01/2015.

Keywords: Novation, APBN, Procurement of goods and/or services, Legal Implications, Legal Protection.

¹ Study Duty Staff of PT PLN (Persero), Board of Directors of PLN-UGM Cooperation Award Scholarship MIH Jakarta Campus 2017.

²Lecturer at the Department of Commercial Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta (Academic Advisor)